

Rp 6 Miliar Setahun Bayar Listrik 3.109 LPJU

■ Dinas Rencana Ganti Jenis Lampu untuk Berhemat

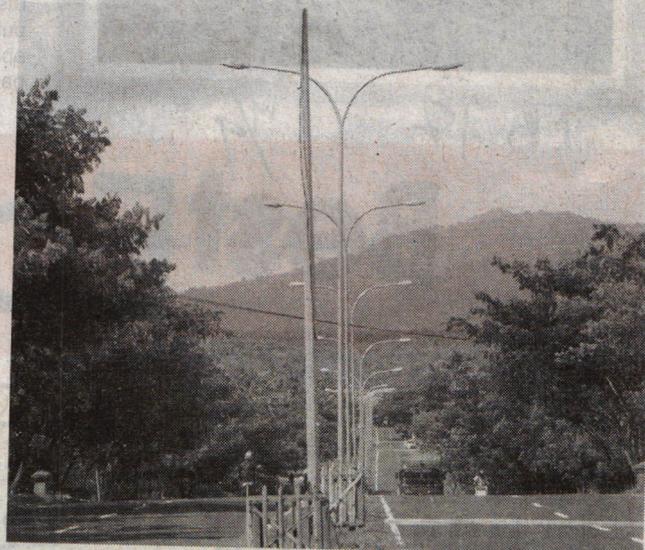
AMLAPURA, TRIBUN BALI - Tagihan biaya listrik untuk 3.109 unit Lampu Penerang Jalan Umum (LPJU) yang terpasang di seluruh Karangasem per tahun mencapai Rp 6 miliar lebih. Tingginya tagihan listrik LPJU dikarenakan tingginya penggunaan energi listrik.

Tiap LPJU yang ada menggunakan lampu ukuran 250 Watt. Lampu tersebut menyala hampir 24 jam karena jarang dimatikan petugas. Ini membuat penggunaan pulsa listrik begitu boros dan cepat habis.

Kepala Dinas Perhubungan Ida Bagus Putu Swastika mengatakan, tagihan listrik LPJU dibayar tiap bulan. Rata-rata pengeluaran sebulan kisaran Rp 500 juta hingga Rp 700 juta.

"Kami langsung yang bayar ke PLN. LPJU yang di bayar yakni 1.903 unit milik Karangasem, provinsi 558 unit, dan pusat 648 unit. Lampu tersebut menerangi sekitar 943,88 kilometer jalan di Karangasem," kata Ida Bagus Putu Swastika, Rabu (13/9).

Ia memprediksi biaya tagihan listrik kemungkinan akan meningkat tahun depan dikarenakan ada pemasangan puluhan unit LPJU baru di



TRIBUN BALI/SAIFUL ROHIM

MELINTAS - Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Raya Veteran, Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan Karangasem, Rabu (13/9).

seluruh Kecamatan di Karangasem. Terutama jalur yang dilintasi kendaraan, seperti jalur utama Amlapura-Singaraja, Amlapura-Klungkung, dan jalan pelosok desa.

"Tahun ini kami pasang puluhan unit LPJU, anggarannya sekitar Rp 1,6 miliar. Tahun depan rencana kami usulkan kembali bila ada dana dari pemerintah," kata Suastika.

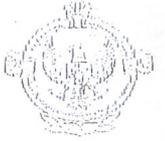
Mulai tahun depan, Dishub akan melakukan efisiensi listrik dengan menambah

meterisasi yang berfungsi mengatur pulsa listrik LPJU. Lampu 250 Watt diganti dengan lampu LED yang lebih irit. Tujuannya agar tagihan listrik per tahun bisa ditekan, dan mengalami penurunan.

"Lampu yang 250 Watt kita ganti dengan LED 100 Watt. Rencana ini sudah kita coba di Jalan Ngurah Rai. Hasilnya memuaskan, jalan terang walau memakai lampu LED yang 60 Watt," akui Suastika. (ful)

Edisi : Kamis, 14 September 2017

Hal : 17



Eks Dirut Sudutkan Terdakwa

■ Sidang Korupsi Alkes RSUD Mangusada Badung

DENPASAR, TRIBUN BALI - Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Mangusada Badung menghadirkan saksi mantan Direktur RSUD Badung Mangusada, Dr Agus Bintang Suryadhi. Dalam keterangannya, eks Dirut ini menyudutkan terdakwa Ketua Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Ketua Panitia Lelang RSUD Mangusada, I Ketut Sukartayasa.

Sidang dengan pemeriksaan saksi Agus Bintang berjalan panas setelah tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikoordinir Jaksa I Wayan Suardi terlibat perdebatan dengan saksi.

Awalnya Bintang menjelaskan proses penganggaran alat kesehatan di RSUD Mangusada. Ia mengatakan awalnya membuat usulan ke Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk pengadaan alat kesehatan senilai Rp 40 miliar. Dari usulan ini, Kemkes hanya menyetujui Rp 25 miliar.

"Kemkes lalu mengalihkan kewenangan ke Kabupaten Badung dan selanjutnya saya yang ditunjuk melalui SK Bupati sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)," jelasnya di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila, Rabu (13/9)

di Pengadilan Tipikor Denpasar.

JPU mencecar dr Bintang terkait HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang menjadi awal masalah. Namun dr Bintang mengaku tidak tahu soal HPS pada lelang pertama dan kedua. Ia hanya tahu soal HPS di lelang ketiga. "Karena HPS pada lelang ketiga dipaparkan dalam rapat," ungkapnya.

"Masak anda sebagai pimpinan tidak pernah dilaporkan soal HPS itu," tanya Suardi ngotot. Dr Bintang lalu menuding jika PPK yang dijabat oleh dr Nurija yang membuat sendiri HPS, dan akhirnya digunakan dalam lelang tersebut. Pun saksi mengatakan tidak tahu soal pembuatan HPS tersebut. Di akhir sidang, dr Bintang juga memojokkan terdakwa dengan menyebut terdakwa sebagai pihak yang mengusulkan PT MMI sebagai pemenang lelang.

"Perbuatan ini dilakukan untuk memenangkan Muhammad Yani sebagai Dirut PT Mapan Medika Indonesia (MMI). Sukartayasa mereka-yasa dan mengatur harga-harga barang tersebut untuk memenangkan PT MMI," jelas Jaksa Suardi saat pembacaan dakwaan kala itu.

Barang yang dimanipulasi

dari harga sebenarnya di antaranya bedside monitor untuk IGD, peralatan bank darah, meja operasi, instrument set bedah syaraf, instrument ortopedi serta peralatan medis lain. Ada juga peralatan non medis berupa ambulans jantung dan ambulans bencana.

"Dengan penetapan PT MMI sebagai pemenang dengan cara melawan hukum melahirkan surat perjanjian kontrak tidak sah senilai Rp 21,1 miliar. Setelah dipotong pajak 10 persen, uang yang masuk ke rekening atas nama PT MMI sebesar Rp 19,2 miliar dan dibelanjakan

dalam wujud barang serta kepentingan masyarakat di RSUD Mangusada Rp 12,9 miliar," ungkap Jaksa Suardi.

Perkara ini diusut Ditreskrimsus Polda Bali mulai 2014 dan telah memeriksa 32 saksi. Selain telah menyidangkan terdakwa, penyidik Polda Bali juga sudah menetapkan dr I Made N yang merupakan Kepala Bidang Dokter Umum RSUD Mangusada Badung yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tersangka. Untuk tersangka dr I Made N masih tahap penyidikan dan belum ditahan. (can)

Lelang Sampai Tiga Kali

SELAIN dr Bintang sebagai KPA, saksi dr Nurija juga ditunjuk sebagai PPK dan terdakwa Sukartayasa ditunjuk sebagai Kepala Unit Pengadaan dan Ketua Panitia Lelang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Suardi lalu menanyakan proses lelang yang dilakukan hingga tiga kali.

"Untuk proses lelang pertama dan kedua dibatalkan karena tidak ada yang lolos administrasi. Lelang ketiga barulah ada pemenang yaitu PT MMI," papar dr Bintang.

Sidang mulai memanas saat JPU menegaskan keterangan dr Bintang yang sebelumnya menyebut PT MMI sebagai pemenang lelang ketiga juga sempat ikut dalam lelang pertama dan kedua namun tidak lolos administrasi.

Namun dr Bintang membantah mengeluarkan pernyataan tersebut. "Saya tidak ada bilang kalau PT MMI ikut lelang pertama dan kedua," bantahnya. Namun Jaksa Suardi tetap mengejar jika dr Bintang sempat melontarkan pernyataan itu. "Mungkin pendengaran saya yang salah. Padahal tadi anda bilang kalau pemenang lelang juga ikut lelang pertama dan kedua," timpal kembali Jaksa Suardi. (can)

Edisi : Kamis, 14 September 2017

Hal : 5